



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 2735/PAUDNI.421.9/DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

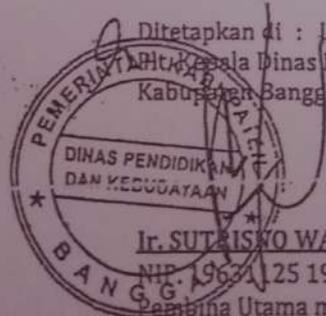
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Luwuk Selatan Nomor 15/KB.MK/LB/XI/2015 Tanggal 02 Nopember 2015.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat Paud Ditjen PLS,  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUTIARA KOMPO  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai  
Pengelola : SRI YUNIYATI, S.Pd  
Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Mutiara Luwuk
- KEDUA : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Nopember 2015 s/d 03 Nopember 2020 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :  
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengemukakan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,  
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk, 03 Nopember Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan  
Kabupaten Banggai



Ir. SUTARISKO WARINDO, ME

NIP. 196311251991031007

Pembina Utama muda IV/c

Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai di Luwuk
5. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Luwuk Selatan



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 217/O/2000**

**TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1999/2000**

**XVIII. SULAWESI TENGAH**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
TAHUN 2000**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode tahun 1999 - 2004;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/C/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode tahun 1999 - 2004;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/C/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 82/M.PAN/11/2000 Tanggal 6 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0296/O/1978;
  - b. Nomor 0295/O/1978;
  - c. Nomor 034/O/1997;
  - d. Nomor 035/O/1997;
  - e. Nomor 036/O/ 997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

REKAPITULASI LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 217/O/2000 TANGGAL 17 NOPEMBER 2000

| NO. | PROPINSI            | PEMBUKAAN |     |      |     |     | JUMLAH | PENERANGAN |     |      |     |     | JUMLAH | TOTAL |
|-----|---------------------|-----------|-----|------|-----|-----|--------|------------|-----|------|-----|-----|--------|-------|
|     |                     | TK        | SLB | SLTP | SMU | SMK |        | TK         | SLB | SLTP | SMU | SMK |        |       |
| 1.  | DKI JAKARTA         | -         | -   | -    | -   | -   | -      | -          | -   | -    | -   | -   | -      | -     |
| 2.  | JAWA BARAT          | 1         | 1   | 16   | 3   | 4   | 25     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 25    |
| 3.  | JAWA TENGAH         | 3         | -   | 17   | 1   | 4   | 25     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 25    |
| 4.  | D.I. YOGYAKARTA     | -         | -   | 2    | -   | -   | 2      | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 2     |
| 5.  | JAWA TIMUR          | 2         | -   | 12   | 1   | -   | 15     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 15    |
| 6.  | D.I. ACEH           | 1         | -   | 21   | 5   | 1   | 28     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 28    |
| 7.  | SUMATERA UTARA      | -         | -   | -    | 11  | -   | 11     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 11    |
| 8.  | SUMATERA BARAT      | -         | -   | 5    | -   | -   | 5      | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 5     |
| 9.  | RIAU                | -         | -   | 5    | 2   | 1   | 8      | -          | -   | -    | 2   | -   | 2      | 10    |
| 10. | JAMBI               | -         | -   | 6    | 1   | 1   | 8      | -          | -   | -    | 1   | -   | 1      | 9     |
| 11. | SUMATERA SELATAN    | -         | -   | 16   | 8   | 1   | 25     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 25    |
| 12. | LAMPUNG             | -         | -   | 12   | 4   | 2   | 18     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 18    |
| 13. | KALIMANTAN BARAT    | -         | -   | 5    | 4   | -   | 9      | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 9     |
| 14. | KALIMANTAN TENGAH   | -         | -   | 5    | 3   | 1   | 9      | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 9     |
| 15. | KALIMANTAN SELATAN  | -         | -   | 13   | -   | 1   | 14     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 14    |
| 16. | KALIMANTAN TIMUR    | -         | -   | 24   | -   | 2   | 26     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 26    |
| 17. | SULAWESI UTARA      | -         | -   | 20   | -   | -   | 20     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 20    |
| 18. | SULAWESI TENGAH     | 1         | -   | 24   | -   | 1   | 26     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 26    |
| 19. | SULAWESI SELATAN    | -         | -   | 10   | 10  | 1   | 21     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 21    |
| 20. | SULAWESI TENGGARA   | -         | -   | 12   | 4   | 1   | 17     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 17    |
| 21. | MALUKU              | -         | -   | -    | 2   | -   | 2      | -          | -   | 2    | -   | -   | -      | 4     |
| 22. | SALI                | -         | -   | 2    | -   | -   | 2      | -          | -   | -    | -   | -   | 2      | 4     |
| 23. | NUSA TENGGARA BARAT | 1         | -   | 6    | 1   | -   | 8      | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 8     |
| 24. | NUSA TENGGARA TIMUR | 1         | -   | 8    | 2   | -   | 11     | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 11    |
| 25. | IRIAN JAYA          | -         | -   | 2    | 1   | 2   | 5      | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 5     |
| 26. | BENGKULU            | -         | -   | -    | 1   | -   | 1      | -          | -   | -    | -   | -   | -      | 1     |
|     | JUMLAH              | 10        | 1   | 243  | 64  | 23  | 341    | -          | -   | 2    | 3   | -   | 5      | 346   |

| 1  | 2               | 3                              | 4 | 5             | 6                  | 7  |
|----|-----------------|--------------------------------|---|---------------|--------------------|--|
| 18 | SULAWESI TENGAH |                                |   |               |                    |  |
| A  | PEMBUKAAN       | 1. TK Negeri PEMBINA Banggai   | - | Luwuk         | Kabupaten Banggai  | 11.1.1.4236.23.01.18.51<br>11.1.1.4236.23.01.18.51<br>11.1.1.4236.23.01.18.51<br>11.1.1.4236.23.01.18.52<br>11.1.1.4236.23.01.18.52<br>11.1.1.4236.23.01.18.52<br>11.1.1.4236.23.01.18.52<br>11.1.1.4236.23.01.18.53 |
|    |                 | 2. SLTP-Negeri 3 Lo Bangkurung | - | Lo Bangkurung | Kabupaten Banggai  | 11.1.1.4242.23.01.18.51<br>11.1.1.4242.23.01.18.51   |
|    |                 | 3. SLTP Negeri 4 Lo Bangkurung | - | Lo Bangkurung | Kabupaten Banggai  | 11.1.1.4242.23.01.18.51<br>11.1.1.4242.23.01.18.52<br>11.1.1.4242.23.01.18.52  |
|    |                 | 4. SLTP Negeri 8 Luwuk         | - | Luwuk         | Kabupaten Banggai  | 11.1.1.4242.23.01.18.52<br>11.1.1.4242.23.01.18.52<br>11.1.1.4242.23.01.18.53  |
|    |                 | 5. SLTP Negeri 4 Bunta         | - | Bunta         | Kabupaten Banggai  |  |
|    |                 | 6. SLTP Negeri 2 Buko          | - | Buko          | Kabupaten Banggai  |  |
|    |                 | 7. SLTP Negeri 2 Bulagi        | - | Bulagi        | Kabupaten Banggai  |  |
|    |                 | 8. SLTP Negeri 5 Pagimana      | - | Pagimana      | Kabupaten Banggai  |  |
|    |                 | 9. SLTP Negeri 7 Donggala      | - | Banawa        | Kabupaten Donggala |  |

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. Taman Kanak-kanak                | (TK) Negeri   | 235 buah;    |
| 2. Sekolah Luar Biasa               | (SLB) Negeri  | 38 buah;     |
| 3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | (SLTP) Negeri | 10.743 buah; |
| 4. Sekolah Menengah Umum            | (SMU) Negeri  | 2.907 buah;  |
| 5. Sekolah Menengah Kejuruan        | (SMK) Negeri  | 794 buah;    |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Nopember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAJIRIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

| 1   | 2         | 3                              | 4 | 5           | 6                           | 7   |
|-----|-----------|--------------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|
| 26. | BENGKULU  |                                |   |             |                             |   |
| A.  | PEMBUKAAN | 1. SMU Negeri 2<br>Arga Makmur | - | Arga Makmur | Kabupaten Bengkulu<br>Utara | 11.1.2.4251.23.01.26.511-<br>11.1.2.4251.23.01.26.512-<br>11.1.2.4251.23.01.26.515-<br>11.1.2.4251.23.01.26.521-<br>11.1.2.4251.23.01.26.522-<br>11.1.2.4251.23.01.26.523-<br>11.1.2.4251.23.01.26.525- |

47

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,

